



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH (LKPP) DAN KETUA KOMISIONER KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala LKPP dan Ketua Komisioner KPPU
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 31 Mei 2016
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d 17.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	: Ir. H. Mulyadi (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dwiyanti, S.Sos
Hadir Pemerintah	: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Hadir Anggota	: ... Orang dari 46 Orang Anggota Komisi VII DPR RI : Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Acara	: 1. Terkait Klarifikasi tentang Penugasan dan Mekanisme Penunjukkan Langsung Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Anggaran 2016 di Beberapa Kementerian. 2. Dan lain-lain.

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 dibuka pukul 14.40 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ir. H. Mulyadi, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Komisi VII DPR RI dengan acara, Terkait Klarifikasi tentang Penugasan dan Mekanisme Penunjukkan Langsung Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Anggaran 2016 di Beberapa Kementerian dan lain-lain.

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI telah mendengar penjelasan dan penegasan dari Kepala LKPP bahwa pihak LKPP belum pernah menerima Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk berkonsultasi secara resmi dalam hal penunjukan langsung atas pelaksanaan anggaran pengadaan barang dan jasa APBN Tahun Anggaran 2016.
2. Komisi VII DPR RI telah mendengar penjelasan dan penegasan dari Kepala LKPP bahwa LKPP tidak setuju atas proses penunjukan langsung sebagian besar paket pekerjaan kepada BUMN-BUMN diantaranya paket penunjukan langsung sebesar Rp. 493 Milyar karena tidak sesuai dengan regulasi pengadaan barang dan jasa.
3. Komisi VII DPR RI telah mendengar penjelasan dan penegasan dari KPPU bahwa KPPU pada prinsipnya tidak setuju atas proses penunjukan langsung yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena tidak memberikan kesempatan kepada usaha sejenis secara adil dan terbuka.
4. Komisi VII DPR RI akan mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas penunjukan langsung kepada Komisi VII DPR RI.

Catatan:

Setelah mendengarkan penjelasan dari LKPP dan KPPU Komisi VII DPR RI akan mengambil sikap resmi yang berkaitan dengan proses penunjukan langsung yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang dilakukan oleh Kementerian ESDM RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 17.10 WIB

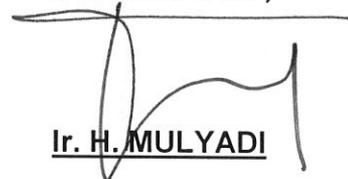
Jakarta, 31 Mei 2016

KEPALA LKPP



AGUS PRABOWO

KETUA RAPAT,



Ir. H. MULYADI

WAKIL KETUA KPPU



R. KURNIA SYA'RANIE, S.H., M.H.